

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar, dapat dikatakan hampir kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu berhubungan dengan tanah, hubungan ini terjadi oleh karena tanah itu memberi penghidupan bagi manusia dalam hal tempat tinggal, sebagai mata pencaharian seperti pertanian, perkebunan, perumahan, perkantoran bahkan industri yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.¹

Tanah juga merupakan aset yang sangat penting dalam sebuah pembangunan di suatu negara yang diperlukan guna pertumbuhan dan percepatan terutama di bidang pembangunan ekonomi misalnya pengadaan lahan pertanian, pembangunan perumahan, pembangunan bendungan, pembangunan pabrik, pembangunan infrastruktur dan lain-lain.

Pembangunan merupakan upaya manusia dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya yang dipergunakan bagi pemenuhan kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan hidup yang dimanifestasikan melalui seperangkat kebijakan publik. Setiap kabupaten akan memilih dan

¹ Soerjono Soekanto, *“Meninjau Hukum Indonesia, Suatu Pengantar Untuk Mempelajari Hukum Adat”*, UI-Press, Jakarta, 1981, hlm.91.

menerapkan strategi pembangunan tertentu yang dianggap tepat untuk mewujudkan hal tersebut.

Termasuk dalam kegiatan pembangunan adalah pembangunan untuk kepentingan umum yang harus terus menerus diupayakan pelaksanaannya seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk yang disertai dengan semakin meningkatnya kemakmurannya. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan.

Infrastruktur juga memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi sebuah fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya yang akan dikembangkan terus-menerus dengan menyediakan lahan yang memadai sehingga pembangunan infrastruktur dapat berjalan dengan baik.

Pemerintah sesuai dengan fungsinya mempunyai tanggung jawab yang cukup besar dalam pengadaan tanah dan pelaksanaan pembangunan, demi ketersediaan infrastruktur guna pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat banyak. Tanggung jawab pembangunan merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya oleh pihak pemerintah saja karena pemerintah belum tentu mempunyai lahan yang dibutuhkan dalam pembangunan, akan tetapi dari pemerintah tersebut, masyarakat

harus ikut andil dalam pembangunan demi tercapainya infrastruktur yang dikehendak.²

Pembangunan infrastruktur yang saat ini perlu diperhatikan berasal dari sektor pertanian. Sektor pertanian merupakan lapangan kerja yang menjadi tumpuan hidup masyarakat di pedesaan, terutama bagi kelompok miskin pedesaan. Pertanian juga memegang peranan penting dalam menyediakan lapangan pekerjaan sebagian penduduk.

Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memiliki peran penting dalam menyediakan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur sektor pertanian, jalan, dan perumahan. Pembangunan dalam sektor pertanian tidak terlepas dari akan kebutuhan air sehingga pemerintah harus membuat ketersediaan air agar petani bisa mengelola lahan secara baik sehingga dapat meningkatkan produktifitas disektor pertanian serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan bagi petani itu sendiri dengan tidak hanya mengandalkan air pada musim penghujan saja.

Pada kenyataannya gambaran sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomian di pedesaanpun kondisinya tampak belum terlihat hasil yang memadai. Sebagai contoh cuaca ekstrim, musim penghujan yang menyebabkan bencana alam banjir, musim kemarau panjang menyebabkan kekeringan yang mengarah pada paceklik sehingga mengalami gagal panen.

² Syah, M. Iskandar, *“Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum”*, Jala Pertama Aksara, Jakarta, 2010, hlm.20

Petani di Kabupaten Kudus tergolong sebagai petani gurem dengan sumber daya tanah dan keuangan yang minim semakin terjepit dengan kondisi yang demikian. Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang kerusakan lingkungan yang mengakibatkan degradasi atau penurunan. Salah satu faktor terjadinya degradasi lingkungan disebabkan oleh ulah manusia yang kurang bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan dengan sengaja mengeksploitasi lingkungan secara besar-besaran tanpa memikirkan akibatnya pada jangka panjang yang dapat mengganggu keseimbangan dan kerusakan alam.

Kerusakan lingkungan seperti ini dapat menimbulkan akibat yang negatif bagi masyarakat, khususnya petani. Dampak yang ditimbulkan dari kerusakan lingkungan salah satunya adalah bencana alam banjir. Bencana banjir ini sering terjadi karena rusaknya lingkungan di daerah hulu dan DAS (Daerah Aliran Sungai) sehingga siklus air tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banjir merupakan bencana yang merugikan masyarakat jika banjir itu sendiri terjadi di lingkungan masyarakat.³

Bencana alam dapat memberikan dampak yang luar biasa bagi petani. Kondisi lahan pertanian yang tergenang air tidak dapat lagi difungsikan sebagaimana mestinya, tentu ini sebagai salah satu faktor penyebab kegagalan panen petani. Bencana alam banjir dan kekeringan mempunyai kaitan yang erat khususnya dibidang.

³ Abdurrahman, " *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*," PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm.19.

Lahan pertanian yang mengalami penggenangan oleh banjir serta oleh kekeringan tidak bisa ditanami oleh para petani sehingga petani mengalami gagal panen. Berkaitan hal tersebut, pembangunan infrastruktur yang berfungsi sebagai pengairan petani pada musim kemarau serta penampungan air pada musim penghujan sangat diperlukan. Salah satu bentuk nyata dari pembangunan tersebut ialah pembangunan waduk lagung. Dalam proyek pembangunan tak jarang menemui beberapa permasalahan.

Permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dalam perspektif tindak pidana adalah permasalahan yang menyangkut dengan tanah. Tanah tidak lagi sekedar dipandang sebagai masalah agraria semata yang selama ini diidentikkan sebagai pertanian belaka, melainkan telah berkembang, baik manfaat maupun kegunaannya, sehingga terjadi dampak negatif yang semakin kompleks, bahkan tanah sering menimbulkan masalah dalam masyarakat serta sendatan dalam pelaksanaan pembangunan.

Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, sesuai Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 Angka 3 menyebutkan bahwa:

“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Ketentuan mengenai tanah juga dapat terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar

Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang / badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lokasi yang dipakai untuk pembangunan waduk lagung adalah desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo dan desa Kandangmas Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus dengan luas mencapai 196 Ha dengan total 547 pemilik tanah sampai dengan akhir 2014. Masalah yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pembangunan waduk lagung ini adalah permasalahan tanah yaitu pembebasan lahan. Sebagian warga menganggap bahwa harga yang diberikan oleh pemerintah dalam pembebasan lahan terlalu murah yakni Rp 28000 (dua puluh delapan ribu rupiah) untuk tanah miring dan Rp 31000 (tiga puluh satu ribu rupiah) untuk tanah datar.

Pemerintah Kabupaten Kudus dalam melakukan pembebasan tanah sudah sesuai dengan peraturan yang dipakai. Warga yang menolak pembebasan lahan membuat sebuah kelompok yang dinamai Forum Komunikasi Masyarakat Korban Waduk lagung (Forkomakembung) dan menyalurkan keinginan warga kepada Pemerintah Kabupaten melalui unjuk rasa, dan demonstrasi melalui spanduk-spanduk tentang hak-hak rakyat

yang juga harus dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kudus dalam pembebasan lahan untuk pembangunan waduk lagung.

Peran serta kepolisian sektor Jekulo sangat penting untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan pasal 13 yaitu:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian sektor Jekulo melakukan koordinasi dengan pihak terkait tentang penyelesaian pembebasan lahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul **“Peran Serta Kepolisian Sektor Jekulo dalam Penyelesaian Permasalahan Sosial Pembangunan Waduk Logung di Kabupaten Kudus”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang tersebut diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menghambat pembebasan lahan pada pembangunan waduk lagung di Kabupaten Kudus?

2. Bagaimana upaya Kepolisian Sektor Jekulo dalam upaya penyelesaian permasalahan sosial pembangunan waduk lagung di Kabupaten Kudus?

C. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul peran serta kepolisian sektor Jekulo dalam penyelesaian ganti rugi tanah pembangunan waduk logung di Kabupaten Kudus membahas tentang rumusan masalah faktor apa saja yang menghambat pembebasan lahan pada pembangunan waduk logung di Kabupaten Kudus, dan bagaimana peran Kepolisian Sektor Jekulo dalam upaya penyelesaian permasalahan sosial pembangunan waduk logung di Kabupaten Kudus. Pada rumusan masalah dalam penelitian ini tidak ada kemiripan dengan penelitian sebelumnya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menghambat pembebasan lahan pada pembangunan waduk logung di kabupaten Kudus
2. Untuk mengetahui upaya Kepolisian Sektor Jekulo dalam upaya penyelesaian permasalahan sosial pembangunan Waduk logung di Kabupaten Kudus

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai masukan bagi ilmu pengetahuan yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya tentang penyelesaian permasalahan sosial pembangunan waduk logung di Kabupaten Kudus
- b. Sebagai masukan untuk menambah ilmu pengetahuan pada para pembaca atau masyarakat pada umumnya dan penulis pada khususnya

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan jawaban terhadap pokok permasalahan yang diteliti yaitu dalam penyelesaian permasalahan sosial pembangunan waduk logung di Kabupaten Kudus
- b. Memberikan gambaran mengenai bagaimana peran serta Kepolisian Sektor Jekulo dalam penyelesaian permasalahan sosial pembangunan waduk logung di Kabupaten Kudus

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik ataupun bentuk hitungan lain. Metode

penelitian kualitatif dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena. Menurut Aseim Strauss dan Juliet Corbin ada tiga unsur utama penelitian kualitatif. Pertama, data bisa berasal dari bermacam sumber biasanya dari wawancara dan pengamatan. Unsur kedua, terdiri dari berbagai prosedur analisis dan interpretasi yang digunakan untuk mendapatkan temuan atau teori. Unsur ketiga ialah laporan tertulis dan laporan lisan.

Pendekatan kualitatif ini, peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan warga yang terkena pembebasan tanah untuk pembangunan Waduk lagung dan juga informan dari pihak Pemerintah Kabupaten Kudus yang bertujuan mendapatkan informasi.

2. Jenis data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan data-data yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penulisan, adapun jenis dan sumber data yang penulis gunakan dibagi ke dalam dua jenis data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer ini digunakan sebagai data utama dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti mencari data untuk membuktikan fakta di lapangan.

b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan mengkaji dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian. Dalam penelitian juga melakukan telaah pustaka, dimana peneliti mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku, jurnal dan surat kabar mengenai upaya Pemerintah Kabupaten Kudus dalam ganti rugi tanah untuk pembangunan Waduk lagung di Desa Tanjungrejo kecamatan Jekulo dan desa Kandangmas kecamatan Dawe Kabupaten Kudus, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

3. Metode pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan dengan melakukan observasi dan interview, dengan pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang menjadi materi pembahasan.

1) Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung yang berkaitan dengan topik permasalahan di lapangan.

2) Interview, yaitu mengadakan wawancara secara langsung dengan dengan informan terkait, yaitu pemilik lahan dan Tim Pengadaan Tanah Kabupaten dan pihak pengacara Pemerintah Kabupaten Kudus.

b. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan, penulis melakukan pengkajian dan mengolah data-data tersebut dalam dokumen-dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, jurnal, dan kajian-kajian ilmiah serta buku-buku yang berkaitan dengan latar belakang permasalahan, termasuk dapat mengumpulkan data melalui media elektronik dan media-media informasi lainnya. Data data yang telah ditelusuri dipilih dan dipilah sesuai dengan kepentingan (*ugensi*) dari penulisan tesis

4. Metode analisis data

Analisis data adalah proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Sementara menurut Bogdan, menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Dalam penelitian kualitatif, data yang sudah diperoleh dalam penelitian dikumpulkan, selanjutnya dikelompokkan untuk dijadikan sebagai bahan masukan yang akan digunakan sebagai bahan bukti dalam pelaksanaan penulisan ilmiah. Selanjutnya dilaksanakan konfirmasi terhadap informan lainnya untuk memperoleh data yang valid. Setelah data tersebut diolah, selanjutnya dilakukan pembahasan terhadap data yang bersifat kualitatif dalam bentuk deskriptif dengan menganalisa

secara seksama. Selanjutnya analisis data dilakukan secara induktif, yaitu penganalisaan dengan cara menarik kesimpulan atas data yang berhasil dikumpulkan dari bentuk umum atau penalaran untuk mencapai kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami lebih tentang penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada Tesis ini dikelompokkan menjadi beberapa sub bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, keaslian penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori yang berupa pengertian yang diambil dari kutipan buku yang berkaitan dengan penyusunan tesis serta literature riview yang berhubungan dengan penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan rumusan masalah dengan memberikan data yang jelas tentang penelitian peran serta kepolisian sektor jekulo dalam penyelesaian permasalahan sosial pembangunan waduk logung di kabupaten Kudus.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berupa simpulan dan saran yang berkaitan dengan penelitian berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

